

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

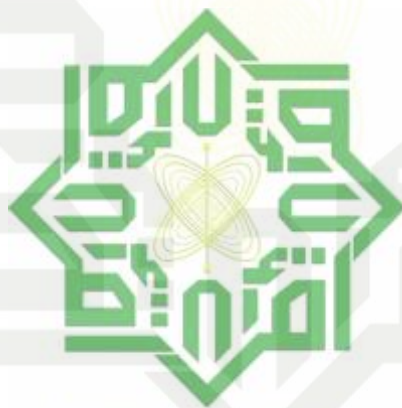
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan sumber**.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN UMUM

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensif
Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 Jurusan Administrasi
Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RIKI DARMAWAN

NIM: 11575104945

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pengkajian yang sah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media cetak atau elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIKI DARMAWAN
NIM : 11575104945
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KABUPATEN KAMPAR DALAM
MELAKSANAKAN KETERTIBAN UMUM
HARI/TANGGAL UJIAN : SELASA, 16 JUNI 2020

PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI



Fakhrurrozi, SE, M.M

NIP. 19670725 200003 1 002

PENGUJI I



Afrizal, S.Sos., M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

PENGUJI II



Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

NIK. 130712074



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum

Riki Darmawan
11575104945

Penelitian ini dilakukan di kantor Satpol PP Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya beberapa kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum yang terjadi di Kabupaten Kampar dalam rentang waktu bulan Januari hingga Desember tahun 2018 terdapat 120 kasus pelanggaran. Penulis melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan fungsi satuan pamong praja Kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum. Sumber penelitian ini penulis menggunakan Data Primer dan Data Sekunder untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam teknik pengambilan data penulis menggunakan teknik triangulasi sehingga di dapat key informan terdiri dari 11 orang yaitu : Kepala Satpol PP, Sekertariat, Bidang penegak produk hukum daerah, Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Bidang perlindungan masyarakat, Personil Satpol PP, Serta Pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dari berbagai sumber data dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar serta Satpol PP Kabupaten Kampar sudah menjalankan tugasnya sebagai aparat yang mengayomi dan menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan daerah sehingga dapat menekan angka pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kampar.

Kata kunci: satuan polisi pamong praja, ketertiban, penegakan, peraturan daerah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Rabb sekalian alam raja segala raja dan tuhan satu-satunya yang maha Esa tempat kita beribadah dan meminta pertolongan serta solawat dan salam kepada utusannya Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dalam gelap-guita kehidupan manusia yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kampar Dalam Melaksanakan Ketertiban Umum**” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar serjana pada program studi ilmu administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. penulis mengucapkan terimah kasih atas semua pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

1. Terima kasih beserta bangga penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayahanda Syafaruddin Dan Ibunda Murniati yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penuh cinta dan kasih sayang sehingga penulis bisa menempu pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi.
2. Terima kasih penulis ucapkan kepada guru-guru yang penulis jumpai dan mengambil ilmu darinya tanpa kalian penulis bukan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa terimah ksih telah mengajarkan bagaimana menghidupkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan memanusiakan manusia dan hal hal baik yang telah kalian ajarkan.

3. Bapak prof. Dr.KH. Ahmad Mujahidin. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarf Kasim Riau
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh said HM. M.Ag. MM selaku dekan fakultas ekonomi dan ilmu sosial, beserta wakil dekan I, II, dan III Fakultas Ekomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.si selaku ketua jurusan administrasi negara dan Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Irdayanti, S.sos, M.A selaku penasehat akademik terima kasih atas waktu, nesahat, motivasi dan masukan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Mhd. Rafi, S.sos. M.si selaku dosen konsultasi proposal dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi sampai selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan ibuk dosen serta pegawai di jurusan administrasi negara yang telah mengajar dan melayani penulis dengan sepenuh hati.
9. Teman –teman jurusan administrasi negara khususnya lokal ANA G 2015
Terima kasih penulis sangat senang dan gembira menjadi sahabat kalian dan semua pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih semoga allah memudahkan urusannya

Dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengalaman, penulis menyadari masi banyak yang harus di perbaiki. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru 2019

UIN SUSKA RIAU

Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabrl	vii
Daftar Gambar	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1Latar Belakang Masalah.....	1
1.2Rumusan Masalah	5
1.3Tujuan Penelitian	5
1.4Sistematika Penulisan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Otonomi Daerah.....	7
2.2 Konsep Pemerintahan Daerah	9
2.3 Pengertian Tugas Pokok Dan Fungsi	14
2.4 Satuan Polisi Pamong Praja	16
2.5 Pengertian Ketrentaman Dan Ketertiban Umum	20
2.6 Pandangan islam.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu	26
2.8 Defenisi Konsep	27
2.9 Konsep Operasional	28
2.10 Kerangka Berfikir.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
3.2.Jenis Dan Sumber Data	31
3.3.Informan Penelitian	32
3.4.Analisa Data	33
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
4.1.Sejarah Berdirinya Satpol PP Kabupaten Kampar	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kampar	36
4.3.Tugas Pokok Dan Fungsi	39
4.4.Kondisi Sumber Daya Kepegawaian.....	41
4.5.Program Prioritas.....	42
4.6.Visi Dan Misi Satpol PP Kabupaten Kampar	43
4.7.Strategi Dan Arah Kebijakan	42

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Ketertiban Umum	46
5.2.Hambatan-Hambatan Yang Dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Ketertiban Umum	50
5.3.Strategi Atau Kebijakan Yang Di Lakukan Untuk Mengatasi Dan Meminimalisir Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Di Kabupaten Kampar	58

BAB VI PENUTUP

6.1.Kesimpulan.....	64
6.2.Saran.....	65

Daftar Pustaka

Lampiran

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konsep Operasional	27
Tabel 3.1 Kerangka Berfikir	28
Tabel 3.1 Key Informen Penelitian	30
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Personil	39
Tabel 4.2 Pangkat Golongan Personil	39
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kasus	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	35
Gambar 5.1 Alur Penyelesaian.....	48





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.

Pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk membentuk peraturan daerah (Perda) guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan pada perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan perda sangat penting untuk mengatur warganya agar menjadi warga Negara yang tertib dan sadar hukum membantu penegak hukum dalam bidang yang terutama berkaitan dengan kertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Peraturan daerah dalam hal ini sebagai konsekuensi dari otonom

daerah, yang mana pemerintah daerah dapat membuat aturan-aturan sendiri dan pelaksanaan penegakannya dapat juga dilaksanakan sendiri melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus tersendiri pula yang masih dalam kerangka Negara republik Indonesia, yaitu Satpol PP.

Pada pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) dinyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Dalam melaksanakan kewenangannya alat-alat perlengkapan negara dengan sendirinya menimbulkan hubungan demikian juga alat-alat perlengkapan daerah seperti Satpol PP juga menimbulkan hubungan-hubungan hukum. Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.
2. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan orang-orang perseorangan (para warga negara), atau dengan badan-badan hukum swasta.”

Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah diatur oleh berbagai ketentuan terutama ketentuan hukum khususnya hukum administrasi pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Keberadaan Satpol PP makin dirasakan di tengah- tengah masyarakat, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2010 Nomor 9, TLNRI Nomor 5094) yang menyatakann-hubungan, yang disebut hubungan hukum. Bahwa “Untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.”

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seringkali harus berhadapan dengan masyarakat, badan hukum, dan bahkan aparaturnya yang tidak memahami Perda maupun kewenangan Satpol PP sebagai Penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum kabupaten Kampar. Hal ini mengingat betapa pun idealnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda, tetapi pada tataran pelaksanaannya belum tentu sesuai antara yang seharusnya dengan fakta yang sesungguhnya, maka pelaksanaan kewenangan Satpol PP sebagai penegak Perda belum efektif atau belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Kampar, pelaksanaan kewenangan dalam penegakan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP masing-masing kabupaten/kota, sedangkan Pemerintahan Daerah Provinsi juga memiliki Perda sendiri yang dalam penegakannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian diatas, Satpol PP Kabupaten kampar lebih aktif (lebih dominan) dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai penegak Perda di daerahnya masing-masing, namun pada kenyataannya Satpol PP Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kampar lebih cenderung sebagai penjaga keamanan seperti penjagaan kantor, penjagaan rumah dinas, dan pengawalan pejabat, dan sebagainya, sedangkan penegakan Perda yang merupakan tugas pokok Satpol PP dalam pelaksanaannya kurang menonjol bila dibandingkan dengan Satpol PP Kabupaten lain. Bagaimana pelaksanaan kewenangan yang sesungguhnya dari Satpol PP dalam penegakan Perda kabupaten kampar dibandingkan dengan kewenangan yang seharusnya berdasarkan kedudukan, tugas, fungsinya dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP kabupaten Kampar dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Penegak Perda, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah fokus utama dalam penelitian ini, mengingat tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, terlepas apakah Satpol PP itu merupakan Satpol PP Provinsi maupun Satpol PP Kabupaten/Kota, mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama yaitu sebagai Penegak Perda, Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat, namun pelaksanaannya tergantung dari masing-masing Satpol PP Daerah yang bersangkutan.

Setelah mengamati permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka menurut pendapat penulis, perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Satpol PP dalam Penegakan ketertiban umum Kabupaten Kampar apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain apakah pelaksanaan penegakan ketertiban berjalan secara efektif atau tidak. Jika belum, apa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan ketertiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten kampar, serta apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penegakan ketertiban tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin di bahas oleh penulis ialah :

Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Satpol PP di Kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum ?

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Agar penulis dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :
 Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan fungsi Satpol PP di Kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pihak lain maupun kajian terhadap pelaksanaan fungsi Satpol PP di Kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang berisikan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buk dengan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis dan sumber, data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yaitu menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya

BAB VI : PENUTUP

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

a. Defenisi otonomi daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri Berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal.

Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

b. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan diselenggarakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga visi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan yaitu:

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat

3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

2.2.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; da
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah akan dibahas selanjutnya.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan
2. Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Urutan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

2.3. Pengertian Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi dalam Peraturan Perundang-undangan punsering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Tugas Pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

1. Defenisi tugas pokok

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), *“The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job”* (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan) Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa *“A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”* (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2. Defenisi Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008),

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu adalah rincian tugas yang sejenis atau Fungsi erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling

berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

2.4 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan *bailluw* pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karna domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Istilah pamong praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan, dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat diwilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi kasta pada agama hindu.

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tentram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitas terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketertiban dan ketentraman umum di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 Tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya diperingati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
2. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat".

2.5. Pengertian Ketertiban dan Ketentraman Umum

Ketentraman dan ketertiban umum berasal dari kata dasar "Tentram" dan "Tertib" yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwardaminta :

"Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang(tidak gelisah, tenang hati,pikiran) misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram artinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, mesalnya tertib acara, aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan , kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan keadaan serta teratur baik."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman , masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengaerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat meerasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut dengan terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.”

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya Menurut Ermaya :

“Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab dan keadaan yang dimaksud diantaranya :

1. Pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat,
2. Bencana alam amupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan
3. Bidang ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C menyebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.”

Defenisi diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Dari rangkaian analisis berbagai teori mengenai ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku.

Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapai nya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan umum.

2.6. Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Allah berfirman dalam Alqur'an Surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat). Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”. (Alqur'an Surat Al-Ahzab ayat 72)

Berdasarkan ayat tersebut, maka manusia adalah makhluk yang memikul beban (*mukallaf*). pembebanan (*taklif*) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah. Secara struktural organisatoris, kita dan semua jajaran Tenaga Kependidikan telah dipetakan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Unpad mulai dari jabatan struktural seperti Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sampai ke jabatan fungsional mulai dari analis sampai ke caraka.

Setiap posisi tersebut juga sudah diatur persyaratan dan tanggungjawabnya sehingga dapat lebih tertib dan teratur dalam pembagiannya. Kondisi ini kita



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

susun bersama agar setiap pegawai mendapat Amanah untuk bertugas dan berfungsi dengan baik.

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (amina- amanatan) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan .

Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi serta posisi yang kita miliki tersebut sebagai amanah, penulis mencuplik tulisan “Amanah Dalam Bingkai Assunah” yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Amanah dalam kekuasaan

Di antara amanah dalam kekuasaan ialah seseorang tidak menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya. Ia tidak boleh mengambil tambahan dari gaji yang telah ditentukan untuknya dengan cara yang tidak benar, seperti menerima suap, atau menerima suap dengan nama hadiah, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya, karena semua itu adalah merupakan bentuk pengkhianatan dan penipuan yang akan membahayakan umat keseluruhan, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk mengerjakan sesuatu,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari dari upah yang semestinya, maka itu adalah korupsi.” (HR. Abu Dawud).

Di antara amanah dalam kekuasaan adalah memberikan suatu tugas atau jabatan kepada orang yang paling memiliki kapabilitas dalam tugas dan jabatan tersebut, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad S.A.W. bersabda : *“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran.” (HR. Al-Bukhari)*

2. Amanah dalam Kehormatan

Termasuk amanah terhadap orang lain adalah menjaga nama baik atau kehormatan orang lain, tidak mencemarkan nama baik atau merusak kehormatannya. Di antara perbuatan yang dilarang berkenaan dengan amanah ini adalah berghibah, mengadu domba, menuduh orang lain berzina, dan semacamnya. Oleh karena itu bekerja saling menghormati dan saling membantu serta berupaya terus membangun hubungan kerja antar jabatan dan antar unit kerja yang harmonis adalah bagian dari amanah.

3. Amanah dalam Rahasia

Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus dijaga. Rasulullah bersabda *“Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah (yang harus dijaga). (HR. Abu Dawud)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau hasil keputusan yang dinyatakan rahasia, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda,

“Majelis pertemuan itu harus dengan amanah kecuali pada tiga majelis; Di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perzinahan, dan di tempat perampokan.” (HR. Abu Dawud).

Perlu kita dapat memilah dan memilih serta menempatkannya tentang data dan informasi yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan secara tepat dan terkendali penyebarannya.

Lebih lanjut Amanah yang kita miliki dapat dijalankan semakin baik dengan bersikap secara Tumaninah, yaitu bersikap tenang atau tidak tergesa-gesa dalam memutuskan tindakan sehingga hasilnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Tuma'ninah sebagai salah satu rukun sholat yang juga sebagai sarana mencapai tingkat kesempurnaan shalat guna membangkitkan kesadaran diri, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Tumaninah dapat dicapai dengan cara rileks dan tidak tergesa-gesa dan pikiran hanya terfokus pada pekerjaan.

Dengan demikian, maka Tugas, Fungsi dan Posisi yang kita miliki sebagai Amanah harus kita jalankan dengan cara Tumaninah, yaitu : Bersikap hati-hati tidak asal dikerjakan tanpa melihat aturan yang menjadi pedoman yang telah disepakati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad rifad syarif syaputra dengan judul Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten pinrang adapun hasil dari penelitiannya yaitu bahwasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi Satpol pp dalam penegakan perda yaitu:

1. Tingkat pendidikan
2. Fasilitas atau peratan
3. Peran pemerintah dan regulasi
4. Tindakan pidana
5. Serta pemberian hukum efek jerah kepada pelaku pelanggaran

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi dengan judul Peran Satpol PP dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian , pengawasan, penertiban,dan peredaran minuman beralkohol adapun hasil dari penelitiannya yaitu :

1. Dalam upaya pelaksanaan perda tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban peran satpol pp kabupaten banyumas adalah dengan melakukan operasi PEKAT dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi perda.
2. Penegakkan hukum peraturan daerah oleh satpol pp kabupaten banyumas telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kendala-kendala yang dihadapi datpol pp kabupaten banyumas dalam upayanya dalam menegakkan perda berasal dari kendala eksternal dan internal

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya rikaro utomo, Nina Widowati dengan judul analisis kinerja Sataun Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, adpun hasil dari penelitian tersebut adalah kinerja Satpol PP Kabupaten Blora masih kurang sesuai dengan misi dan visi yang telah dtetapkan.

2.8.Defenisi Konsep

- a. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang membidangi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi.
- b. Fungsi Satpol PP mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan. Ketiganya menunjukkan betapa penting dan strateginya fungsi Satpol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintahan daerah serta menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa
- c. Pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapan sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut.

2.9 Konsep operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

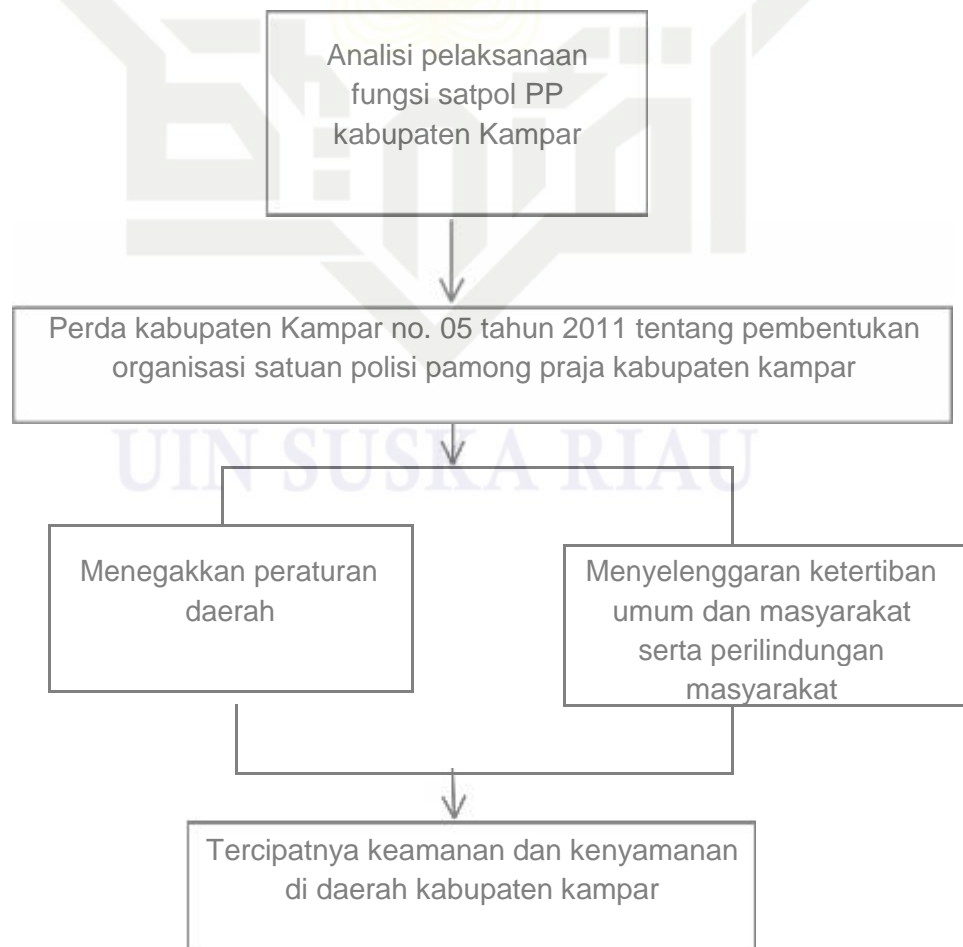
Variabel	Indikator	Sub indicator
Analisis pelaksanaan fungsi satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di kabupaten Kampar	1. Menegakkan peraturan daerah 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan masyarakat serta perlindungan masyarakat	a. Penyusunan program dan penegakan peraturan daerah
		b. Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah a. Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum. b. Kebijakan perlindungan masyarakat. c. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilu. d. Membantu pengamanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dan penertiban keraiamaian daerah. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
--	--	---

Sumber :Peraturan daerah kabupaten Kampar no 05 tahun 2011 tentang pembentukan organisasidan tata kerja satuan polisipamong praja kabupaten Kampar

2.10. Kerangka berfikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kabupaten Kampar yang beralamatkan di jalan Lingkar, Langgini Kec. Bangkinang. Penelitian ini dilakukan di bulan Juli 2019

3.2 Jenis Pengumpulan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan atau data sekunder yang meliputi dokumen dan lain-lain (Lexy J moleong, 2014 :157)

3.2.1 Data Primer

Data yang diperoleh berupa informasi langsung dari informan melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu : Analisis pelaksanaan fungsi satpol PP kabupaten Kampar

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud berasal dari data historis yang faktual berupa laporan di media massa, dokumen, buku dan referensi pustaka yang lain yang dapat digunakan untuk memahami, membandingkan serta mempertajam analisis. Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten Kampar
- b) Dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.
- c) Wawancara dengan responden

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang paling memungkinkan untuk melakukan sistematikasi dalam melakukan analisis terhadap studi kasus (*case study*) yang sudah terjadi, menurut Robert K. Yin 1995:103 meliputi ; Dokumen-dokumen, Arsip dokumen, Wawancara, Pengamatan langsung, partisipan-Observasi.

- a. Kajian Pustaka (*Library Research*) adalah mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema kajian yang hendak diteliti baik berupa buku, opini atau informasi media massa atau dokumen resmi.
- b. Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden mengenai kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kampar dengan kata lain wawancara ini sebagai diskusi antara penulis dan informasi untuk mengetahui jawaban dari masalah inti penelitian secara mendalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kampar
- d. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumentasi juga dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan- kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai masalah penelitian, adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informen Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala satpol PP kampar	1
2	Secretariat	1
3	Bidang penegak produk hukum daerah Bidang ketertiban umum dan ketentraman	1
4	masyarakat	1
5	Bidang perlindungan masyarakat	1
6	Personel satpol PP kabupaten Kampar	5
7	Pedagang Kaki Lima	1
Jumlah		11

3.5 Analisa Data

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis digunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdiri Satpol PP Kabupaten Kampar

Satuan polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan *bailluw* pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi *kepanewon* serta *detasemen polisi pamong praa* adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karna domain fungsi utamanya adalah menjaga keterbitan umum dan ketentraman masyarakat. Istilah *pamong praja* adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : *pamong* adalah seseorang yang di pandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang *pamong* adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat.

Selanjutnya makna dari kata *praja* itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang di *emong* di bina dalam hal ini adalah *rakyat*. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *pamong praja* adalah petugas atau individu yang di hormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tentram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan surat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keputusan UR 32/2/21 tentang perubahan nama Detasemen pamong praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Sat Pol PP dalam setiap tahunnya. Dengan terbitnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengeluarkan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugas yakni PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan telah direvisi menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi di seluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja Sat Pol PP maka diterbitkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi Sat Pol PP yang merupakan landasan hukum Tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Kampar era otonomi, maka kedepan dibutuhkan upaya-upaya yang makin intensif dan signifikan terhadap penanganan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tepatnya pasal 255 dan 256 maka pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

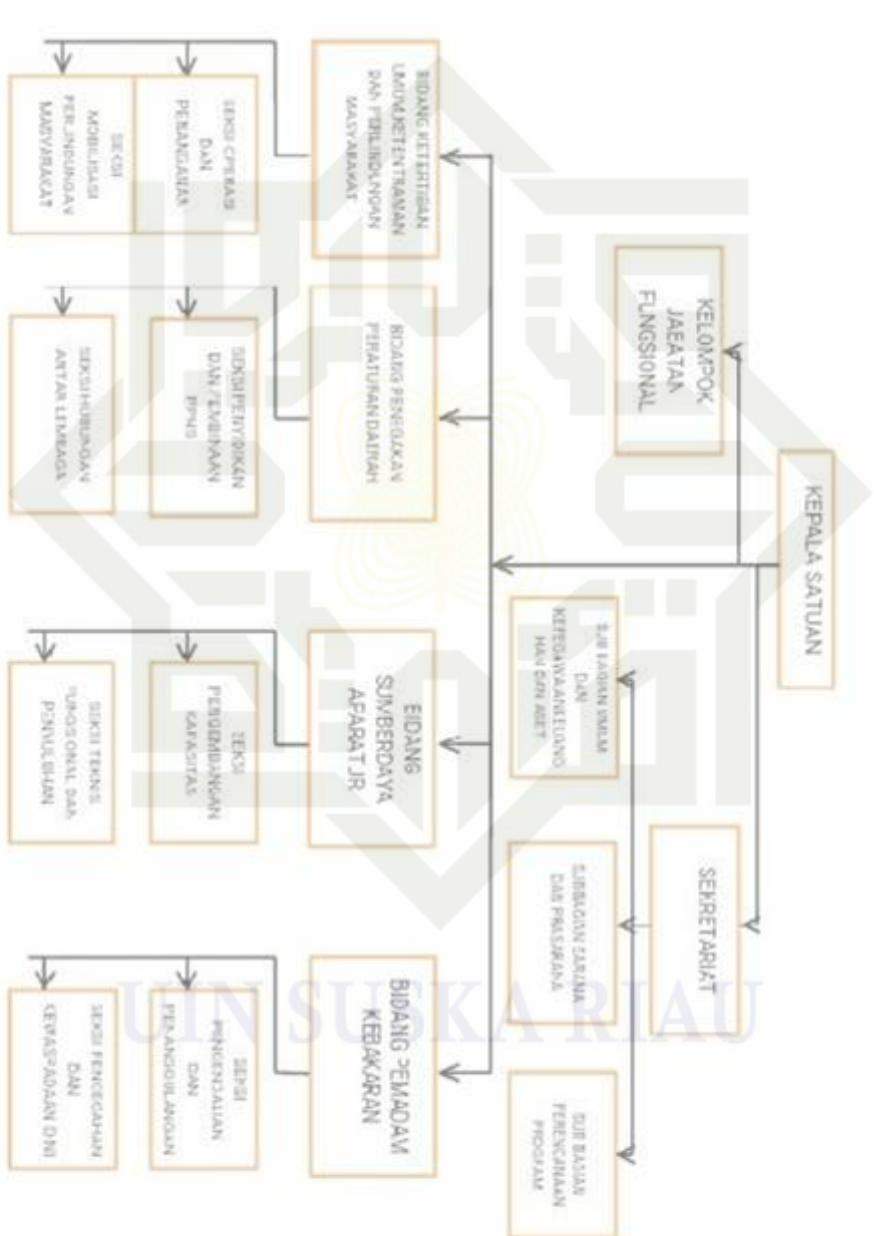
4.2. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kampar

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar merupakan unsur perencana penyelenggaraan penertiban dan keamanan. struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalahh sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Satuan

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana
- c. Sub Bagian Perencanaan Program

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Penngamanan
- b. Seksi Mobilisasi Perlindungan Masyarakat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi penyidikan dan Pembinaan PPNS
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas
- b. Seksi Teknis Fungsional dan Penyuluhan

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan
- b. Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Diri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Daerah.

Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam tugas penegakan Perda berarti menjadi alat daerah agar Perda di taati dan dijalankan sesuai dengan tujuannya. Tugas menegakkan Perda tidak berarti hanya melakukan tindakan terhadap pelanggarnya, tetapi juga mengupayakan agar Perda dapat di taati. Di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP bertugas membantu bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiataannya dengan rasa aman.

Oleh karna itu disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati. Dibidang Linmas, salah satu tugas pentingnya adalah ikut serta melakukan segala usaha dan kegiatan melindungi dan menyelamatkan masyarakat terhadap bencana alam sehingga dapat

membatasi memperkecil jatuh nya korban serta mengurangi penderitaan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati
- b. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- c. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- d. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran.
- f. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
- g. Melakukan Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Kondisi Sumber Daya Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Kampar terhitung pada 31 Juli

2018 terdiri dari :

3. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 55 Orang
4. Status Pegawai Honorer : 398 Orang
5. Total : 452 Orang

Secara terperinci kondisi sumber daya aparatur pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Personil

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	PNS	HONOR/THL	JUMLAH
1.	SD/SEDERAJAT	-	-	-
2.	SMP/SEDERAJAT	3	-	3
3.	SMA/SEDERAJAT	30	298	328
4.	SARJANA MUDA/SEDERAJAT(D3 /D2)	-	10	10
5.	S1	17	89	106
6.	S2	5	1	6
TOTAL		55	398	452

Sumber : Staf Kasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban

Umum Satpol PP Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Pangkat/Golongan Personil

NO	GOLONGAN/PANGKAT	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0,22
2.	Pembina (IV/a)	3	0,66
3.	Penata Tk I (III/d)	6	1,32
4.	Penata (III/c)	5	1,10
5.	Penata Muda Tk I (III/b)	3	0,66
6.	Penata Muda (III/a)	7	1,55
7.	Pengatur Tk I (II/d)	4	0,88
8.	Pengatur (II/c)	16	3,54
9.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	4	0,88
10.	Pengatur Muda (II/a)	5	1,10
11.	Juru (I/c)	1	0,22
12.	Honor (Non Golongan)	398	88,05
	TOTAL	452	100

Sumber : Staf Kasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum SatpolPP Kabupaten Kampar

4.5. Program Prioritas

Sedangkan masing-masing program yang telah ditetapkan dibobot sesuai dengan tingkat urgensi dalam mendukung tugas pokok dan kegiatan sekretariat dan bidang bobot masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Program Pemeliharaan Kantrantibnas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
- h. Program Pemadam Kebakaran
- i. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- j. Program Pengembangan Kapasitas Dan Kasamaptaan Anggota

4.6. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Kampar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sangat menyadari bahwa keberadaan organisasi ini sesuai dengan kedudukan, Tugas pokok dan Fungsinya diharapkan dapat memberikan peran menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dari terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, persaingan, tantangan, dan tuntutan masyarakat, mengharapakan seluruh jajaran dan unit kerja dilingkungan Satuan Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk memiliki pegangan dan komitmen agar organisasi senantiasa dapat *survive*, *antisipatif*, *proaktif* dan *inovatif* untuk masa yang akan datang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi dalam perkembangan permasalahan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah yang lebih baik.

Perubahan yang ingin dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian manfaat untuk maksud tersebut diperlukan visi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang jelas dimana visi tersebut merupakan cara pandang yang jauh kedepan kemana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diarahkan dan apa yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sejalan dengan pandangan dan harapan dimaksud maka pernyataan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TAAT PERATURAN, TERTIB DAN TENTRAM MELALUI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Kemudian Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai organisasi kepada suatu fokus yang menjelaskan organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya serta kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakannya dalam upaya pencapaian visi juga sekaligus mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya dan mengarahkan organisasi agar aktif dan dapat mengikuti perkembangan dilingkungannya dan jiwa otonomi daerah, serta harus senantiasa berusaha mewujudkan keharmonisan hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas melalui kaidah-kaidah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar memiliki Misi sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Perundang-Undangan secara profesionalisme

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membina masyarakat agar tertib, tentram melalui Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah dan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pembinaan, penertiban dan ketentraman terhadap pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dan dan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Mewujudkan kewibawaan Pemerintah Daerah melalui Penegakan Peraturan Dearah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan lainnya.

4.7.Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, program dan petunjuk bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar bersinergi dengan instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan untuk mewujudkan sasaran tujuan, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diperlukan suatu strategi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kebijakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2012-2020 telah dialokasikan serangkaian kegiatan sehingga diharapkan pada akhir tahun tersebut tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Satpol PP Kabupaten Kampar sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat yang mengayomi dan menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sudah menunjukkan kemampuannya di dalam menegakkan disiplin peraturan daerah yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Oleh karnanya diharapkan kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman umum khususnya di daerah kabupaten kampar.
2. Hambatan yang dihadapi secara internal adalah secara organisasi anggaran untuk Satpol PP dianggap kurang memadai dan kurangnya personil Satpol PP sedangkan hambatan eksternalnya yaitu hambatan yang ada di lapangan berupa adanya masyarakat yang sudah diingatkan tapi tetap saja tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga Satpol PP harus mengingatkan kembali ketika melakukan penertiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sedangkan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar dilatar belakangi oleh kegiatan atau program yang merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2018.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan bagi program atau kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelangan ketentraman umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar:

1. Program atau kegiatan ini harus terus terlaksana untuk menekan kasus pelanggaran ketertiban dan ketrentaman umum yang ada diwilayah Kabupaten Kampar yang sudah meresahkan masyarakat.
2. Penambahan anggota Satpol PP di Seksi Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum karena diseksi ini tugas program pembinaan dan pembimbingan dilakukan dan pada saat ini Satpol Kabupaten Kampar kekurangan anggota.
3. Sarana dan prasaran penunjang untuk program pembinaan dan bimbingan harus terus ditingkatkan agar program ini dapat berjalan maksimal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sabarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Pasolong, harbani. 2014. Teori administrasi publik. Alfabeta: Bandung.
- Syafri, wirman. 2012. Studi tentang administrasi publik. Erlangga: Jakarta
- Pranoto. Juni.2011. strategi pembaharuan administrasi dan manajemen publik. Alfabeta: Bandung.
- Muhammad. Suarsono. 2012. Startegi pemerintahan manajemen Organisasi publik. Erlangga: Jakarta.
- Dermawan. Risky.2013. pengambilan keputusan landasan filosofif, konsep dan aplikasi. Alfabeta: Bandung.
- Kartono. Kartini. 2010. Pemimpin dan kepemimpinan.rajawali pers: Jakarta.
- Pasolong. Harbani. 2013. Metode penelitian administrasi publik. Alfabeta: Bandung.
- Matondang. 2008. Kepemimpinan budaya organisasi dan manajemen strategik. Graha ilmu: Yogyakarta.

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satpol Pp Kabupaten Kampar.
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal/Website:

Jurnal ilmu pemerintahan volume 2 universitas Hasanudin Juli 2009 tentang analisis tugas pokok dan fungsisatuan polisi pamong praja dalam penegakan perturan daerah di kbupaten pinrang oleh andi kau kadir dkk.

- <https://media.neliti.com/media/publications/100477-ID-analisis-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fun.p>
- <https://lib.unnes.ac.id/27636/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/100382-ID-analisis-kinerja-satuan-polisi-pamong-pr.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PERTANYAAN

10. Pertanyaan Untuk Kepala Satpol PP

1. Sudah berapa banyak kasus yang ditangani oleh Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum yang terjadi di kabupaten Kampar ?
(**MINTA DATANYA, PELANGGARAN APA-APA SAJA YANG TERJADI ?**
SERTA BERAPA BANYAK KASUSNYA DARI SETIAP PELANGGARAN TERSEBUT ?)
 - a. Apa sanksi yang diberikan oleh Satpol PP terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum ?
 - b. Apa cara atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
 - c. Apa saja kebijakan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran ketertiban umum?
 - d. Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Kabupaten Kampar ?
 - e. Peraturan Daerah apa saja yang sudah diterapkan oleh Satpol PP dalam rangka menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?

2. Pertanyaan Untuk Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

- a. Apakah ada program pembinaan bagi para pelaku pelanggaran ketertiban umum ?
- b. Bentuk-bentuk bimbingan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
- c. Apakah bimbingan yang dilakukan tersebut efektif dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
- d. Langkah apasaja yang telah dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum tersebut ?

3. Pertanyaan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat

- a. Apa kebijakan teknis yang dilakukan oleh bidang perlindungan masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
- b. Bagaimana pelayanan informasi bidang perlindungan masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Kampar ?
- c. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas untuk menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pertanyaan untuk Personel Satpol PP

- a. Bagaimana upaya dan hambatan saat melakukan penertiban ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
- b. Apakah saja langkah-langkah yang telah dilakukan Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimana kebijakan Satpol PP mengenai masalah penertiban ketertiban umum?
- d. Adakah kerja sama yang dijalin satpol pp dengan lembaga lain ?
- e. Bagaimana tindakan Satpol PP saat melakukan penertiban ?
- f. Apasaja hambatan-hambatan yang ditemui dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
- g. Salah satu bentuk tugas satpol PP adalah menertibkan ketertiban umum seperti penertiban pedagang kaki lima, nah bagaimana karakteristik pedagang kaki lima yang perlu ditertibkan oleh Satpol PP yang ada di kabupaten Kampar ?
- h. Apasajakah syarat-syarat dilakukannya razia atau penertiban terhadap pedagang kaki lima ?
- i. Bagaimanakah bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP berdasarkan peraturan nomor 05 tahun 2011 Kabupaten Kampar ?
- j. Apakah personil Satpol PP sudah benar-benar menjalankan tugas dan fungsi nya dalam menertibkan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Kampar ?

Jawaban Pertanyaan

Bidang ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Apakah ada program pembinaan bagi para pelaku pelanggaran ketertiban umum ?
tahab awal dilakukan pembinaan, penguasaan, wejangan karna masyarakat umum tidak bisa ditegur langsung dan dikasih hukuman.
2. Bentuk-bentuk bimbingan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
adapun bentuk bimbingan yaitu dengan mendatangi sekolah, diberi pengarahan, materi-materi sedangkan untuk masyarakat nya dilakukan pelatihan tahab linmas.
3. Apakah bimbingan yang dilakukan tersebut efektif dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
cukup efektif, tapi tidak 100%, karna merubah sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dilakukan dengan cara berangsur-angsur, dan jangan sampai bosan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Langkah apasaja yang telah dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum tersebut ?
diberikan arahan, bimbingan dan dilakukan patroli, nah jika pada saat patroli masih membandel maka para pelanggar baru di bawa ke kantor, setelah dikantor kkita kasih pengarahen karna kita tidak bisa memberi hukuman kepada para pelanggar layaknya polisi.
5. Apa kebijakan teknis yang dilakukan oleh bidang perlindungan masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
adanya hansip-hansip yang berperan dalam menjaga ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat
6. Bagaimana pelayanan informasi bidang perlindungan masyarakat dalam menertibkan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Kampar ?
informasi yang didapat dari desa atau kampung-kampung karna hansip berada dilingkungan kampung serta informasi dari forum, atau warga desanya.
7. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas untuk menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
Melakukan pelatihan-pelatihan linmas, yaitu dengan cara mengambil perwakilan dari kecamatan-kecamatan lalu diberi pelatihan untuk mereka mengembangkan ilmu yang didapat kemudian mengaplikasikannya dikampung tempat mereka berada.
Pertanyaan untuk Kepala SatpolPP
8. Sudah berapa banyak kasus yang ditangani oleh Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum yang terjadi di kabupaten Kampar ?
jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum yang terjadi sepanjang tahun 2018 adalah sekitar 120 kasus, kasus yang paling banyak terjadi adalah penertiban penginapan tempat hiburan, warung dan cafe, kasus ini berjumlah sebanyak 57 kasus dan terjadi di daerah bangkinang, tapung hilir serta 13 koto kampar
9. Apa sanksi yang diberikan oleh Satpol PP terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum ?
berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, hal ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apa cara atau strategi yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
dengan cara edukasi, himbauan, sosialisasi kemudian melakukan patroli baik siang maupun malam terhadap kemungkinan-kemungkinan aktifitas yang ,mengganggu ketentraman umum.
11. Apa saja kebijakan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi pelanggaran ketertiban umum?
dilakukan tindakan secara tertulis, secara bertahab, kemudian tindakan eksekusi terhadap pelanggaran itu sendiri.
12. Peraturan Daerah apa saja yang sudah diterapkan oleh Satpol PP dalam rangka menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
peraturan daerah yang sudah diterapkan yaitu perda ketertiban umum nomor 8 tahun 2000 *Pertanyaan Untuk Personil Satpol PP*
13. Bagaimana upaya dan hambatan saat melakukan penertiban ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
memberikan sosialisasi dilapangan kepada masyarakat atau organisasi untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perda. sedangkan hambatannya berupa ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan terkadang masyarakat kurang memahami dan tidak mengindahkan teguran-teguran petugas di lapangan ketika bermasalah baru protes kepada petugas.
14. Apakah saja langkah-langkah yang telah dilakukan Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar?
langkah- langkah yang dilakukan oleh satpol PP berupa sosialisasi, satpol pp selaku pelayan masyarakat tentu aspek sosialisasi secara preventif kita lakukan dilapangan. dan di SOP kita punya aturan yaitu berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah memberi tahu secara teoritis kepada masyarakat, apabila teguran-teguran yang diberikan tidak diindahkan maka kita akan masukkan ke dalam objek yustisi, yustisi adalah sebuah objek dimana disana terdapat beberapa elemen stakeholder lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI disitu kita akan mengambil langkah-langkah kepada yang melanggar aturan dan yang terakhir kita akan memproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Bagaimana kebijakan Satpol PP mengenai masalah penertiban ketertiban umum?

yang pertama, mengacu pada peraturan atau kebijakan yang ada, kepada peraturan yang ada saja, sebab kebijakan untuk pelanggaran itu tidak ada, cuman kebijakan mungkin menegosiasi ulang tapi untuk rangka bekerja bukan untuk negosiasi2 lainnya, yang kita laksanakan hanya sesuai peraturan saja.

16. Adakah kerja sama yang dijalin satpol pp dengan lembaga lain ?
tentu ada, karna kita tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan stakeholder lainnya atau instansi vertikal lainnya seperti kepolisian negara dan TNI

17. Bagaimana tindakan Satpol PP saat melakukan penertiban ?
kita tetap mengedepan kan sikap humanis karna yang kita bina adalah masyarakat bukan yang lain, maka kita melaksanakan tindakan di lapangan itu dengan cara humanis tapi tetap dengan sikap tegas dan menegakkan peraturan yang berlaku.

18. Apasaja hambatan-hambatan yang ditemui dalam menertibkan ketertiban umum di Kabupaten Kampar ?
secara organisasi tentu anggaran satpol pp mungkin kurang serius tapi secara dukungan agak terhambat, sedangkan hambatan di lapangan ada jguga masyarakat yang sudah di ingatkan tapi tetap saja membandel dalam penertiban,

19. Salah satu bentuk tugas satpol PP adalah menertibkan ketertiban umum seperti penertiban pedagang kaki lima, nah bagaimana karakteristik pedagang kaki lima yang perlu ditertibkan oleh Satpol PP yang ada di kabupaten Kampar ?
umumnya PKL sudah tertib tapi yang namanya di masyarakat ada juga beberapa yang melanggar, sepsrti masih ditemukannya PKL yang berjualan di trotoar dan ini sangat mengganggu ketertiban umum yang seharusnya digunakan oleh masyarakat untuk pejalan kaki.

20. Apasajakah syarat-syarat dilakukannya razia atau penertiban terhadap pedagang kaki lima ?
razia dilakukan apabila ada pelanggaran yang dilakukan, karna tujuan dari razia ini adalah mengamankan kan suatu tempat, untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman, seperti hal nya tahun 2018 kota bangkinang berhasil mendapatkan piala adipura dan satpol pp selalu berkomitmen untuk melaksanakan penertiban terutama untuk di sekitar kota bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Bagaimanakah bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP berdasarkan peraturan nomor 05 tahun 2011 Kabupaten Kampar ?

Satpol pp melakukan penertiban dimana terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar seperti PKL, satpol pp tetap menrtibkan karna telah mengganggu ketentraman dan ketertiban pengguna jalan.

22. Apakah personil Satpol PP sudah benar-benar menjalankan tugas dan fungsi nya dalam menertibkan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Kampar ?

sejauh ini sudah berbuat semaksimal mungkin, oleh karna itu kami mengharapkan kepada seluruh pihak untuk sama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman umum khususnya di daerah kabupaten kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rekapitulasi Kasus Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Ketentraman Dan Ketertiban Umum Bulan Anuari S/D Desember 2018 Di Kabupaten Kampar

No	Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	Penertiban Penginapan, Tempat Hiburan, Warung dan Cafe	57 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
2.	Penertiban Warnet, PS, dan Game Online	5 Kasus	Pembinaan Lapangan
3.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Pertambangan Galian C (SIRTU)	13 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
4.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Pertambangan Galian C (TANAH TIMBUN)	17 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
5.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Toko Modern	4 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
6.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Tower Menara Telekomunikasi	1 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
7.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Perumahan	1 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
8.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Bangunan	11 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Reklame Perusahaan	7 Kasus	Pembinaan Lapangan
10	Penertiban Usaha/ Kegiatan Perkebunan	2 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
11.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Perdagangan	1 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
12.	Penertiban Usaha/ Kegiatan Pergudangan	1 Kasus	Dilakukan Pembinaan dan Pemberian Surat Pernyataan
Total Kasus		120 KASUS	



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biodata Narasumber

Nama	: Nurbit, S.Ip
Umur	: 67 Tahun
Jabatan	: Kepala Kantor Satpol PP
Lama kerja	: 37 Tahun
Nama	: Hamdanis, S.Pd, M.Pd
Umur	: 39 Tahun
Jabatan	: Kabid Tribumtranmas
Lama kerja	: 11 Tahun
Nama	: M. Yuzar, S.Ip
Umur	: 39 Tahun
Jabatan	: Personil Satpol PP
Lama kerja	: 11 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2451/2019

Pekanbaru, 29 Maret 2019 M

: Biasa

22 Rajab 1440 H

: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Riki Darmawan

NIM : 11575104945

Jurusan : Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Kampar dalam Melaksanakan Katertibab Umum". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.VII/PP.00.9/3131/2019
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riki Darmawan
NIM. : 11575104945
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)
Kabupaten Kampar dalam Melaksanakan Katertiban Umum" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2452/2019
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 29 Maret 2019 M
22 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kampar
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riki Darmawan
NIM. : 11575104945
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP)
Kabupaten Kampar dalam Melaksanakan Katertibab Umum" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kuasa, Dekan,

Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22568
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : U/001/FVII/PP.09.9/3131/2019 Tanggal 30 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RIKI DARMAWAN**
2. NIM / KTP : **11575104945**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN UMUM**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/384

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON-RISET/2568 tanggal 8 Mei 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIKI DARMAWAN |
| 2. NIM | : | 11575104945 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN KAMPAR DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN UMUM |
| 8. Lokasi | : | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dinikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Mei 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Kampar Di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. LINGKAR (STA 7+ 800) BANGKINANG

Kode Pos : 28412

Bangkinang, 05 Agustus 2019

Kepada Yth :
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
di
Pekanbaru

Nomor : 331.1/POL.PP-SET/444

Lampiran : -
Surat Keterangan

**Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum Wr, Wb,**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIKI DARMAWAN**
NIM : 11575104945
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **ANALLISIS PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KABUPATEN
KAMPAR DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN
UMUM**

Benar yang bersangkutan telah melakukan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

a.n. **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIS**



Drs. AGUSTAR, M.Si

Pembina Tingkat I
Nip. 19720619 199201 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Riki Darmawan dilahirkan disebuah desa yang terletak di Kabupaten kampar tempatnya didesa Sawah pada tanggal 13

Mei 1996 dari Ayah syafaruddin dan Ibu Murniati.

Riwayat pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 010 Naga Beralih tamat tahun 2009.

kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah

Swasta (MTS) Di desah Sawah tamat tahun 2006 dan melanjutkan ke SMA

Tamat Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) pada

perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN

SUSKA RIAU), Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial - Jurusan Administrasi

Negara.

UIN SUSKA RIAU